

ISSN: 2338-4123
Volume 5, Nomor 1, Juni 2016

JURNAL
EKONOMIKA
INDONESIA

Analisis Aplikasi Akad Ijarah Terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng
Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
Damanhur & Sri Rahayu

Pengembangan Usaha Kopi Arabika Pasca Panen di Kabupaten Aceh Tengah
Ichsan

Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengusaha
Micro di Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
Mukhlis Muhammad Nur & Riski Kana

Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh
Devi Andriyani

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA
The Effect Monetary Policy to Inflation in Indonesia
Cut Putri Mellita Sari

Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Kelapa
Sawit Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
Hijri Juliansyah & Khairunnisa

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Provinsi Aceh
An Analysis Of Factor Influencing Employment Opportunities In Aceh Province
Irfan

Pengaruh Ba'i (Jual Beli) Ikan dalam Perahu Terhadap Pendapatan
Nelayan Pusong Lama Kota Lhokseumawe
Julius Dharma

Pengaruh Al-Musaqah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Cot Girek
Munardi & Gema Ananda

Pengaruh Hasil Produksi Tanaman Padi Terhadap Kesejahteraan Petani
(Studi Kasus Kecamatan Nisam Aceh Utara)
Umaruddin Usman, & Lindawati



Jurusan Ekonomi Pembangunan
FAKULTAS EKONOMI
Universitas Malikussaleh

ISSN: 2338-4123
Volume 5, Nomor 1, Juni 2016

JURNAL
EKONOMIKA
INDONESIA

Analisis Aplikasi Akad Ijarah Terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng
Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
Damanhur & Sri Rahayu

Pengembangan Usaha Kopi Arabika Pasca Panen di Kabupaten Aceh Tengah
Ichsan

Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengusaha
Micro di Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
Mukhlis Muhammad Nur & Riski Kana

Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh
Devi Andriyani

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA
The Effect Monetary Policy to Inflation in Indonesia
Cut Putri Mellita Sari

Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Kelapa
Sawit Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
Hijri Juliansyah & Khairunnisa

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Provinsi Aceh
An Analysis Of Factor Influencing Employment Opportunities In Aceh Province
Irfan

Pengaruh Ba'i (Jual Beli) Ikan dalam Perahu Terhadap Pendapatan
Nelayan Pusong Lama Kota Lhokseumawe
Julius Dharma

Pengaruh Al-Musaqah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Cot Girek
Munardi & Gema Ananda

Pengaruh Hasil Produksi Tanaman Padi Terhadap Kesejahteraan Petani
(Studi Kasus Kecamatan Nisam Aceh Utara)
Umaruddin Usman, & Lindawati



Jurusan Ekonomi Pembangunan
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Pengembangan Usaha Kopi Arabika Pasca Panen di Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah penghasil kopi Arabika, yang di dunia internasional dikenal dengan nama Gayo Sumatera Coffe. Kopi ini telah diekspor ke beberapa negara Eropa dan Asia. Komoditas kopi Arabika Gayo telah memberikan kontribusi yang besar bagi PDRB Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh pengusaha kopi Arabika pasca panen di Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data penelitian diperoleh dari review dokumen, kuesioner, observasi, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa masalah yang dialami usaha kopi di Aceh Tengah antara lain terkait dengan Standar Nasional Indonesia, Sistem Resi Gudang, Balai Latihan Kerja, produk turunan, kepelabuhanan dan sertifikasi asal komoditas.

Kata Kunci: *Kopi Arabika, pasca panen, Aceh Tengah*

Ichsan

*Dosen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas
Malikussaleh*

PENDAHULUAN

Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Aceh yang berada di Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten ini memiliki 14 kecamatan, meliputi Kecamatan-kecamatan: Atu Lintang, Bebesen, Bies, Bintang, Celala, Jagong Jeget, Kebayakan, Ketol, Kute Panang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Rusip Antara, dan Silih Nara. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2014) menyatakan Kabupaten Aceh Tengah merupakan kabupaten yang memiliki jumlah produksi kopi terbesar di Aceh bersama Kabupaten Bener Meriah. Kopi Gayo merupakan salah satu komoditas *unggulan* di daerah ini. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Kedua kabupaten ini merupakan penghasil kopi terbesar di Propinsi Aceh (Aceh Dalam Angka dan Disbunhut Aceh, 2013). Kedua daerah ini berada pada ketinggian 1200 m dari permukaan laut dan memiliki perkebunan kopi yang tergolong salah satu terluas di Indonesia, yaitu sekitar 81.000 ha. Masing-masing 42.000 ha berada di Kabupaten Bener Meriah dan selebihnya 39.000 ha di Kabupaten Aceh Tengah.

Saat ini baru 25% petani kopi di Dataran Tinggi Gayo yang tergabung dalam *Asosiasi Fair Trade Indonesia* (AFTI) dan bersertifikasi, dari total 98.000 petani kopi yang ada di kedua kabupaten tersebut (www.Seputar Aceh, 2012). Menurut Ketua AFTI, Mustawalad, sampai 2013 ini, baru terdapat 14 perusahaan yang berbentuk koperasi di dua kabupaten tersebut mengantongi sertifikat, dari tiga jenis sertifikasi yang ada. Sertifikat-sertifikat itu terdiri dari sertifikat *Fair Trade* oleh *Fair Trade Labeling Organization* yang berbasis di Born, Jerman, kemudian sertifikat organik yang terdiri dari *Control Union* (CU), *National Agriculture Australia* (Nasaa), IMO, dan Ceres, serta sertifikat *Rain Forest*.

Menurut data BPS Aceh 2013, pada tahun 2011 luas lahan kopi seluruh Aceh mencapai

121.094 ha, dengan jumlah produksi mencapai 53 950 ton. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah produksi kopi Aceh naik menjadi 121.845 ha dengan produksi 54.314 ton. Hal ini menunjukkan bahwa lahan kopi di dua Kabupaten ini naik berkisar 0,6% dan produksi naik sebesar 0,6% pula. Khusus Aceh Tengah luas lahan pada tahun 2011 kopi arabika sebanyak 48000 ha dan kopi robusta sejumlah 2.315 ha. Sedangkan jumlah produksi pada tahun 2011 kopi arabika 24.328 ton dan kopi robusta 874 ton. pada tahun 2012 luas lahan kopi arabika adalah 48.300 ha dan kopi robusta 2.315 ha dengan jumlah produksi arabika sebanyak 25.370 ton dan robusta sejumlah 793 ton. Dalam kegiatan usaha kopi, para petani dan pengusaha kopi di Aceh Tengah, Takengon, tentu saja menghadapi berbagai masalah. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi berbagai masalah usaha Kopi Arabika pasca panen di Kabupaten Aceh Tengah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian survei yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2014. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui review dokumen-dokumen terkait, kuesioner, observasi, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi RPJP dan RPJM Aceh, RPJM Kabupaten Aceh Tengah, Renstra SKPA dan SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Tengah, laporan BPS Aceh dan BPS Kabupaten Aceh Tengah, dan laporan SKPA/SKPK yang terkait dengan pengembangan agroindustri. Wawancara dilakukan dengan pejabat/pengambil kebijakan dari dinas-dinas yang terkait dengan pengembangan agroindustri (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindagkop dan UKM dan para pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh masyarakat, aparat desa, perantara

pemasaran, dan konsumen. Pengamatan yang dilakukan, disamping berhubungan dengan pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi dan pemasaran, juga terkait dengan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam industri berbasis pertanian tersebut dan hal-hal yang dianggap relevan lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN Produksi Kopi di Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah merupakan kabupaten yang memproduksi kopi Arabika terbesar di Aceh diikuti oleh Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan sumber dari Aceh dalam Angka 2014 (BPS, 2014), ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 1. Produksi Kopi dan Luas lahan di kabupaten Kota di Aceh

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2011		2012	
	Luas Area (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi Production (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Simeulue	-	-	-	-
2. Aceh Singkil	162	59	163	59
3. Aceh Selatan	1 459	359	1444	357
4. Aceh Tenggara	130	45	130	45
5. Aceh Timur	514	149	514	125
6. Aceh Tengah R	2 315	874	2 315	793
Aceh Tengah A	48 000	24 328	48 300	25 370
7. Aceh Barat	549	117	5 448	81
8. Aceh Besar	1 413	1 528	1 597	886
9. Pidie	9 490	1 589	9 540	1569
10. Bireuen	8	5	8	5
11. Aceh Utara	975	181	975	187
12. Aceh Barat Daya	500	295	500	360
13. Gayo Lues	4 588	1036	4 652	1118
14. Aceh Tamiang	26	4	13	2
15. Nagan Raya	150	52	148	48
16. Aceh Jaya	1 355	236	1430	215
17. Bener Meriah R	1 250	660	1 360	660
Bener Meriah A	48 101	22 414	48 101	22 414
18. Pidie Jaya	71	8	71	9
19. Banda Aceh	-	-	-	-
20. Sabang	-	-	-	-
21. Langsa	-	-	-	-
22. Lhokseumawe	10	6	9	5
23. Subulussalam	28	5	28	5
Jumlah/Total	121 094	53 950	121 845	54 314

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 kopi Arabika dan Robusta Aceh Tengah berkontribusi besar pada lahan dan produksi kopi Aceh. Kontribusi masing-masing untuk lahan adalah Arabika 39,63% dan 39,64%, Robusta 1,9% dan 1,89%. Di sisi produksi, kontribusi kopi Arabika tahun 2011 dan 2012 masing-masing adalah 45,09% dan 46,70%. Sedangkan kontribusi kopi Robusta mengalami penurunan dari 874 ton di tahun 2011 menjadi 793 ton (0,102 %) di tahun 2012. Dalam tabel di atas juga dapat dilihat kabupaten yang memiliki luas lahan kopi terbesar ketiga di Aceh adalah Pidie yaitu sebesar tahun 2011 sebesar 94.90 ha

dan tahun 2012 sejumlah 9.540 ha, tanpa penjelasan luas lahan untuk masing-masing jenis kopi Arabika maupun Robusta.

Kontribusi Kopi terhadap PDRB

Untuk Subsektor Perkebunan, komoditas kopi merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar bagi Kabupaten Aceh Tengah dibandingkan berbagai komoditas lainnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Tengah (2014), kontribusi kopi Arabika bagi PDRB Subsektor Perkebunan pada tahun 2013 mencapai 58,80% Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Sumbangan Komoditas Perkebunan pada PDRB (ADHB)

No	Jenis	Tahun		
		2011	2012	2013
		%	%	%
1	Kopi Arabika	31,76	33,08	58,80
2	Kopi Robusta	1,14	1,03	2,00
3	Tebu	65,12	63,74	35,38
4	Kemiri	0,29	0,29	0,51
5	Cassia vera	0,77	0,76	1,12
6	Kakao	0,40	0,71	1,55
7	Kapulaga	0,04	0,04	0,07
8	Pinang	0,10	0,10	0,17
9	Aren	0,04	0,04	0,07
10	Kelapa Dalam	0,01	0,01	0,03
11	Lada	0,01	0,01	0,01
12	Kapuk/Randu	0,00	0,00	0,00
13	Tembakau	0,19	0,06	0,25
14	Serewangi	-	-	0,02
15	Nilam	0,13	0,13	0,00

Tabel 2 menunjukkan bahwa kopi memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Subsektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2013, diikuti oleh komoditas tebu. Sedangkan komoditas lainnya memiliki kontribusi yang relatif sedikit. Pada tahun 2011

dan 2012 tebu memiliki kontribusi paling dominan, yaitu 65,12 % dan 63,74%, tetapi pada tahun 2013 turun menjadi 35,38%. Sementara itu, pada tahun 2011 dan 2012 kopi (khususnya kopi Arabika) hanya menduduki peringkat kedua setelah tebu yaitu 31,76 % dan 33,08 %.

Data BPS Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014 juga menunjukkan bahwa kopi Aceh Tengah yang diekspor selama periode 2009-2013 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan (kecuali tahun 2010). Jumlah kopi yang diekspor setiap tahun dalam kurun waktu tersebut mencapai 3.671.788 kg atau setara dengan US\$ 80.279.410 (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Volume dan Nilai Ekspor Kopi

No	Tahun	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
1	2009	3.371.000	11.041.300
2	2010	2.748.340	10.804.627
3	2011	3.845.780	25.218.097
4	2012	3.789.634	77.759.717
5	2013	4.604.184	276.573.311
Rerata		3.671.788	80.279.410
Total		18.358.938	401.397.052

Volume ekspor kopi Aceh Tengah selama 2009-2013 secara total mencapai 18.358.938 kg. Sedangkan nilai ekspor dalam waktu lima tahun tersebut diperkirakan sebesar US\$ 401.397.052. Berdasarkan Tabel 3 juga diketahui bahwa tahun 2013 merupakan tahun tertinggi nilai ekspor dan volume ekspor

Masalah-Masalah Pasca Panen

Sebagaimana komoditas pertanian atau perkebunan lainnya, kopi di Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki berbagai masalah yang mempengaruhi pengembangannya dalam tahapan pasca panen.

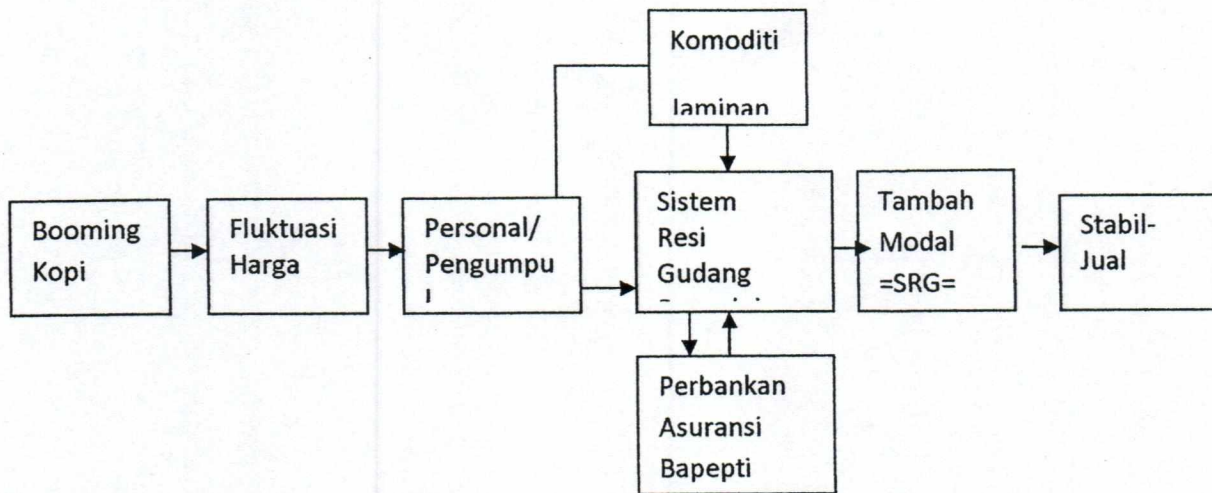
1. Panen, pasca panen dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Tanaman kopi yang dibudidayakan secara intensif biasanya sudah dapat berbuah pada umur 2,5-3 tahun untuk jenis Robusta dan 3-4 tahun untuk Arabika. Hasil panen pertama biasanya tidak terlalu banyak. Produktivitas tanaman kopi akan mencapai puncaknya pada umur 7-9 tahun. Panen budidaya kopi dilakukan secara bertahap, panen raya bisa terjadi dalam 4-5 bulan dengan interval waktu pemetikan setiap 10-

14 hari. Pemanenan dan pengolahan pasca panen akan menentukan mutu produk akhir. Masalahnya sering terjadi pada waktu musim panen di mana petani lebih senang mengumpulkan kopinya (dalam waktu lama). Kemudian petani kopi menjualnya ke pengusaha melalui pengumpul kopi atau langsung ke perusahaan olahan kopi. Masalahnya hal ini menyebabkan menurunnya kualitas kopi dan membuat kopi lebih asam. Hal ini sering dikeluhkan oleh pengusaha olahan dan konsumen luar negeri. Persoalan ini akhirnya bermuara pada standar kopi yang tidak sama. Akibat selanjutnya pengurusan SNI di Kementerian Perdagangan mengalami permasalahan.

2. Sistem Resi Gudang

Jumlah produksi kopi yang melimpah pada saat panen raya menyebabkan harga kopi jatuh. Hal seperti ini tentu saja tidak diinginkan oleh para petani atau pengusaha kopi di Aceh Tengah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menyepakati membangun Sistem Resi Gudang (SRG). SRG ini dapat dijadikan agunan ke bank oleh para petani. Dimana saat harga jual kopi tidak menguntungkan, kopi bisa disimpan di SRG hingga harganya kembali meningkat. Keberadaan SRG diharap dapat memberi keuntungan bagi petani. Dalam hal ini petani dapat mengambil pinjaman dana sebesar 70 persen dari jumlah barang dititip (simpan). Sedang, beban suku bunga dari 12 persen yang ditetapkan per tahun, hanya dibebankan kepada petani sebesar 6 persen. Selebihnya akan disubsidi menggunakan sumber dana APBN (Lueserantara.com, 2014). Di samping itu, adanya SRG diharapkan mampu mengantisipasi permainan harga dari agen pembeli kopi ketika nilai pasaran kopi turun. SRG yang dibangun di Paya Ilang, Kecamatan Bebesen ini, mampu menampung kopi sekitar 400-500 ton. Setiap kopi yang dititip akan mendapat jaminan asuransi dan keamanan dari pihak pengelola.

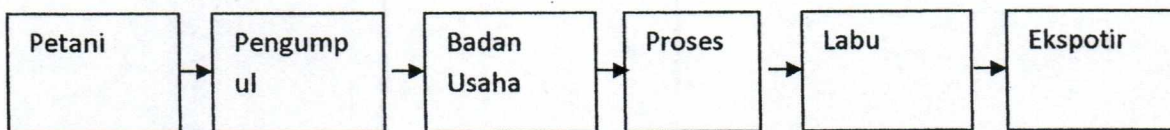


Gambar 1. Mekanisme Sistem Resi Gudang, Aceh Tengah

Gambar 1 di atas menjelaskan mekanisme SRG. Dimulai pada saat panen kopi atau booming kopi, di mana pada saat itu harga kopi menjadi anjlok. Dalam prakteknya pada saat panen para petani menjual hasil kopi mereka kepada pengumpul kopi. Namun pada saat itu pengumpul memiliki jumlah uang yang terbatas sehingga kemampuan mereka untuk membeli kopi pun jadi terbatas. SRG berperan menampung kopi pengumpul tadi untuk disimpan dalam gudang dan dijadikan sebagai barang jaminan. Selanjutnya para pengumpul kopi diberikan uang sesuai proporsi kapasitas

kopi yang mejadi jaminan untuk membeli kopi pada masyarakat. Bantuan modal tersebut dijamin oleh pengelola SRG, perbankan, asuransi dan Bapekti. Dan akhirnya, ketika harga kopi sudah membaik dan stabil maka pengumpul kopi yang telah menempatkan barangnya sebagai jaminan dapat mengambil dan mengeluarkan kopinya untuk diperjualbelikan.

Sedangkan jika tidak menggunakan SRG (sistem tradisional), jalur distribusi usaha kopi dapat dijelaskan sebagaimana dalam Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Sistem Tradisional

Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa alur distribusi kopi berawal dari petani kopi yang telah memanen hasil kopinya dan menjualnya kepada para pengumpul kopi. Selanjutnya pengumpul kopi menjual kepada badan usaha yang beraktifitas di Aceh Tengah, baik perorangan, CV, PT ataupun koperasi. Kemudian diproses menjadi labu kopi dan siap untuk dijual atau diekspor.

3. Penyuluh

Penyuluh pertanian dipandang sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam memacu produksi hasil-hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Dalam Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi

wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung jawab tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan revitalisasi penyuluhan melalui program pementapan sistem penyuluhan, yang meliputi aspek-aspek penataan dan penguatan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. Dalam hal ini, peran para penyuluh lapangan perlu digiatkan, yaitu sebagai tenaga pembina, pendamping, motivator, mitra kerja, dan teknikal dalam memfasilitasi kepentingan pelaku utama. Peran Penyuluh tersebut terkait pada kebutuhan informasi teknologi, informasi pasar, informasi sarana prasarana, informasi permodalan usaha, sampai kepada pengembangan sistem kemitraan pelaku utama dengan pelaku usaha.

Data yang didapat dari Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tengah (2013) menunjukkan di daerah ini terdapat 110 tenaga penyuluh, dengan kualifikasi pendidikan 3 orang magister, 28 orang pendidikan Strata 1, dan 79 orang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka tersebar di 14 kecamatan dan melaksanakan pekerjaannya di seluruh kampung (desa) di Aceh Tengah. Penyuluh masih banyak yang berstatus PPL THL dan berpendidikan setingkat SMA. Tenaga PPL THL ini juga memiliki kompetensi yang masih terbatas, padahal mereka dituntut untuk bekerja pada berbagai bidang penyuluhan. Mestinya ke depan pemerintah Aceh Tengah dapat memetakan kembali alokasi sumber daya PPL sesuai dengan kebutuhan. Tentunya para PPL ini diharapkan dapat bekerja lebih profesional untuk meningkatkan hasil pertanian, termasuk kopi, yang menjadi unggulan di Aceh Tengah.

4. Kepelabuhanan dan Dokumen Certify of Origin

Hal lain yang menjadi masalah bagi ekspor kopi di Aceh Tengah adalah masalah gudang di pelabuhan. Pengekspor kopi menginginkan adanya gudang kering di pelabuhan yang dapat digunakan khusus untuk kopi. Keluhan lain di pelabuhan adalah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang menimbulkan berbagai inefisiensi. Sementara itu, dokumen *Certify of Origin* (Surat Keterangan Asal) juga masih sulit pengurusannya. Para pengusaha enggan mengurus dokumen ini di Propinsi Aceh karena setelah pengurusan mereka harus kembali lagi ke Gayo. Pengusaha kopi lebih mudah jika mengurus dokumen ini ke propinsi tetangga (Sumatera Utara) dan kemudian langsung mengekspor lewat Pelabuhan Belawan. Hal inilah yang pada gilirannya menjadi penyebab ekspor kopi Aceh Tengah (dan Aceh umumnya) tidak tercatat sebagai kegiatan ekspor dari Aceh, tetapi dari Sumatera Utara.

5. Balai Latihan Kerja

Sampai saat penelitian ini dilakukan, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh Tengah belum terealisasi. BLK sekarang berada di Bener Meriah, didirikan sejak tahun 1982/1983. Pada tahun 1987 KKL Kabupten Aceh Tengah, dengan persetujuan Menpan No.B.170/1/MENPAN/8/86 tanggal 29-8-1986 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.840/MEN/1986, tanggal 4-9-1986 BLK Aceh Tengah, resmi menjadi suatu unit kerja yang berada langsung di bawah Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Aceh. Lahirnya UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menyebabkan aset BLK Takengon diserahkan kepada Gubernur Propinsi Aceh. Selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat c/q Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, termasuk sejumlah personil tenaga instruktur. Tanah yang digunakan untuk

pembangunan BLK bertempat di Pante Raya dengan luas lahan 20.025 m² bertifikat tanah:6635983, tanggal 4 Januari 1985 (Buku Panduan BLK, 2007). Berdirinya Kabupaten Bener Meriah sesuai UU no 40 Tahun 2004 menyebabkan seluruh eks karyawan BLK Takengon yang telah dikembalikan ke pemerintah pusat, diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi pegawai Bener Meriah. Pada tanggal 13 Maret 2006 dibentuk Dinas Tenaga kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat, dan BLK merupakan salah satu UPTD pada organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil survei di lapangan, BLK Pante Raya ini masih sangat kurang melakukan pelatihan pada bidang pertanian, khususnya yang terkait dengan kopi dan agroindustri kopi. Menurut kepala BLK, partisipasi dari pemuda dalam kegiatan pelatihan masih minim. Selain itu, juga ada pemahaman bahwa masyarakat lebih paham permasalahan kopi dibandingkan instruktur dan teknisi BLK sendiri. Jumlah tenaga kerja pada BLK saat ini sebanyak 5 orang, yaitu: Ahmad Furqan (Operator Jaringan), Sumarwanto (Instalasi Listrik), Suharli (Mobil Listrik), Laili Anhar (Sepeda Motor) dan Ti Hasanah (Menjahit). Sampai saat ini, belum ada tenaga ahli dalam bidang perkebunan maupun masalah kopi.

6. Produk Turunan Kopi

Pengolahan pasca panen kopi tidak hanya berakhir sampai pada tahap kopi siap saji, bubuk kopi, atau kopi kemasan. Pengolahan biji kopi masih dapat dilakukan lebih lanjut, diantaranya berupa kopi instan, *decaffeine coffee*, *liquid coffee extract*, *coffee chicomy mixes*, *coffee soft drink* hingga *specially coffee*. Khusus di Aceh Tengah pelaku usaha kopi umumnya baru melakukan pada tahap bubuk kopi, kopi instan, dan *liquid coffee extract*. Produk-produk turunan kopi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan biji kopi kering.

Pengembangan produk-produk turunan tersebut menjadi peluang pengembangan agroindustri kopi sehingga dapat meningkatkan nilai jual kopi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ternyata masih banyak masalah dalam usaha kopi pasca panen di Aceh Tengah, Takengon, Propinsi Aceh. Pertama, petani kopi terlalu lama menyimpan kopi setelah memanenya. Hal ini menyebabkan pembeli kopi membeli kopi dari petani dengan harga yang murah. Sementara itu, petani kopi juga sukar mendapatkan SNI dari Kementerian Perdagangan karena persoalan kualitas kopi. Kedua, Sistem Resi Gudang yang belum berfungsi dengan baik, termasuk di dalamnya masalah kondisi fisik pergudangan, tata kelola penjaminan harga kopi saat panen raya, dan jaminan kredit perbankan. Ketiga, masih rendahnya kualifikasi penyuluh pemerintah dibandingkan dengan penyuluh lapangan yang dimiliki perusahaan. Penyuluh perusahaan telah terspesialisasi, sedangkan penyuluh pemerintah belum terspesialisasi dan dituntut menangani bidang penyuluhan yang beragam. Keempat, masalah dokumen pengurusan Sertifikat Keterangan Asal. Pengusaha kopi cenderung mengurusnya sertifikat tersebut dan membuat gudang kopi di Medan, ketimbang di Aceh. Kelima, belum optimalnya usaha untuk menghasilkan produk turunan kopi.

Di masa mendatang perlu dilakukan upaya-upaya penanganan berbagai permasalahan pengembangan kopi pasca panen di Aceh Tengah secara menyeluruh dan sinergis. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan menyangkut hubungan antara petani dengan pengusaha, petani dengan resi gudang, petani dengan penyuluh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan kabupaten-kabupaten terdekat dan pemerintah propinsi. Di samping itu, juga perlu dilakukan penelitian dan kajian lanjutan untuk meningkatkan produk turunan kopi.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2014. Aceh dalam Angka 2014.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tengah, 2014. Aceh Tengah Dalam Angka 2014.

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Aceh Tengah, 2013.

Buku Panduan BLK Aceh Tengah, 2007.

Dinas Perkebunan di Aceh, 2014.

Lueserantara.com, 2014. Benarkah Resi Gudang Bermanfaat Untuk Petani Kopi Gayo ...
Leuserantara.com/benarkah-resi-gudang-bermanfaat-untuk-petani-kopi-g... 30 Apr 2014

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).

www.seputaraceh.com/.../hanya-25-persen-petani-kopi-aceh-bersertifikas Hanya 25 Persen Petani Kopi Aceh Bersertifikasi - Seputar ...